

**ANALISIS KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BERAU**

Kintan Ayu Lestari

16120071

Jurusan Akuntansi

STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb

Email : kintan2808@gmail.com

RINGKASAN

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui Bagaimanakah Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Varians Anggaran Pendapatan, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan masing-masing rata-rata sebesar, Varians pendapatan daerah 100.73%, Pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 8.54%, Rasio derajat desentralisasi sebesar 10.03%, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 100.35%, dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah sebesar 112.07%.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Keuangan Daerah, Kinerja

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk penilaiannya berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Agustina 2013, dalam penelitian Pramita 2015).

Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah komponen utamanya berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya Daerah dapat mandiri.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti urusan pemerintahan bidang keuangan di bidang pendapatan daerah.

Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya alam cukup tinggi. Berbagai potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan menjadikan Kabupaten Berau sebagai salah satu pendukung utama pencapaian target.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang

Pendapatan Daerah, terutama tentang yang diteliti oleh penulis yaitu Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Pembaca dan Akademik

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Teori

1. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah berhubungan dengan (pengurusan) keuangan Negara. Hubungan tersebut terlihat dari struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki pos sumbangan dan bantuan (Pra-reformasi) dan dana perimbangan (pasca reformasi).

Halim (2014:43) mendefinisikan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

2. Analisis Laporan Keuangan

Hery (2015:132) Mendefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang penting bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi, dan analisis *trend* akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.

3. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Agustina 2013, dalam penelitian Pramita 2015).

Hal ini sebagaimana

dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُوفِّيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

4. Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah “Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD, dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

5. Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan secara umum dilihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan

analisis Pendapatan Daerah antara lain dengan cara:

a. Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan

(Mahmudi 2019:135)

menyatakan bahwa Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Mahmudi (2019:137)

menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran,

kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan adanya penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah daerah ataukah karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi.

c. Rasio Keuangan

1) Derajat Desentralisasi

Mahmudi (2019:140)

mendefinisikan bahwa derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi

PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kontribusi yang dinilai dalam presentase kriteria kinerja keuangan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Derajat Desentralisasi

Persentase	Kriteria
<10	Sangat Kurang
10.01 – 20	Kurang
20.01 - 30	Sedang
30.01 – 40	Cukup Baik
40.01- 50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 dalam Laksmi (2016)

2) Rasio Efektivitas PAD

Mahmudi (2019:142) mendefinisikan bahwa Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas PAD

Persentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019:141)

3) Rasio efektivitas Pajak Daerah

Mahmudi

(2019:142) menyatakan bahwa Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.

Kajian Empiris

Penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh Baihaqi dari Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu pada tahun 2011 dengan judul “Analisis

kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap Pendapatan daerah Provinsi Bengkulu". Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, analisis kontribusi komponen PAD, analisis tingkat kontribusi komponen PAD terhadap pendapatan daerah serta analisis pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di provinsi Bengkulu belum begitu berperan, hal ini terlihat dari adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2005-2008.

Penelitian ini juga telah dilakukan sebelumnya oleh Al-Gazali yang merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013-2017". Hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil kinerja keuangan pendapatan

daerah secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan masing-masing rata-rata sebesar, Varians pendapatan daerah 101.64%, Pertumbuhan pendapatan daerah negatif 1.66%, rasio keuangan daerah masing-masing sebesar rasio derajat desentralisasi 9.13%, rasio ketergantungan 71,9% rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah 92,15%, rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah 11,68%, rasio efektivitas pajak daerah 115.46%, rasio efisiensi pajak daerah 10,67% dan derajat kontribusi BUMD 1,17%. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil kinerja Keuangan belanja daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara belanja operasi dengan belanja modal, pertumbuhan kinerja keuangan belanja masing-masing rata-rata sebesar, varians belanja daerah 67,97%, pertumbuhan belanja 20,10%, keserasian belanja masing-masing sebesar: rasio belanja operasi terhadap total belanja 60,52%, rasio belanja modal terhadap total 39,32% dan efisiensi belanja 68,07%.

Penelitian ini juga telah dilakukan sebelumnya oleh Lady Lampa dari Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2016 Dengan judul “Analisis Kinerja Pendapatan Pada Dinas Pengelolah Keuangan Asset Dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varians anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, kemandirian daerah, dan efektivitas pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan dilihat dari analisis varians dari tahun 2008-2011 belum sepenuhnya tercapai hanya pada tahun 2008 target anggarannya bisa tercapai, sedangkan pertumbuhan pendapatan cukup baik meskipun sempat turun 2% pada tahun 2010. Sebaiknya pimpinan dinas pengelola keuangan asset dan pendapatan kabupaten minahasa selatan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada, agar target pajak dan retribusi daerah dapat tercapai.

Kerangka Pikir Penelitian

Untuk lebih terarah dan memudahkan penulis dalam penelitian serta menganalisa permasalahan yang akan diteliti dilapangan, maka dalam penelitian ini akan disusun alur kerangka pemikiran yang akan diteliti seperti yang dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Agar penelitian ini bisa dilaksanakan sesuai yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Varians Anggaran Pendapatan Daerah merupakan selisih antara target dengan realisasi anggaran.
2. Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya.
3. Derajat Desentralisasi mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan daerah guna membiayai pembangunan.

4. Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan disbanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah yang ditargetkan.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, yang beralamat di Jalan APT. Pranoto No. 5, Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan di penelitian ini yaitu:

1. Data Deskriptif

Metode penelitan yang digunakan adalah metode deskriptif yang dikaji secara kuantitatif. Sugiyono (2018:199) menyatakan bahwa “analisis deskriptif adalah

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

2. Data Kuantitatif

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama 5 tahun dari tahun 2015-2019, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau berupa data realisasi anggaran.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari data realisasi anggaran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Alat Analisis

Alat Analisis yang digunakan untuk mengetahui Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau adalah:

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan, dengan menggunakan rumus Mahmudi (2019:135):

$$\text{Varians Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran,

kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan tersebut positif, dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan penurunan kinerja pendapatan daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah dapat diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi, dengan menggunakan rumus Mahmudi (2019:137):

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan th t} = \frac{\text{Pendapatan th t} - \text{Pendapatan Th (t - 1)}}{\text{Pendapatan th (t - 1)}} \times 100\%$$

3. Rasio Keuangan

a. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah

daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, dengan menggunakan rumus Mahmudi (2019:140):

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan), dengan menggunakan rumus Mahmudi (2019:141):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik

apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%, dengan menggunakan rumus Mahmudi (2016:141):

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

ANALISIS

Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians (selisih) Anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan untuk membantu pengguna laporan yang memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Berikut ini merupakan tabel perhitungan varians pendapatan daerah Kabupaten Berau pada tahun 2015-2019:

Tabel 5.1 Varians Pendapatan Daerah

TAHUN	ANGGARAN 1	REALISASI 2	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI	
			Rupiah (2-1)	% (2 : 1)
2015	2,289,907,623,615.35	2,216,827,477,960 .72	(73,080,145,654. 63)	96.81%
2016	1,927,968,191,764.00	1,908,498,948,854 .92	(19,469,242,909. 08)	98.99%
2017	1,945,595,742,648.00	1,847,343,428,299 .04	(98,252,314,348. 96)	94.95%
2018	2,130,946,375,802.13	2,319,236,100,866 .37	188,289,725,064 .24	108.84%
2019	2,794,868,894,663.36	2,908,766,535,487 .58	113,897,640,824 .22	104.08%
Rata-rata	2,217,857,365,698.57	2,240,134,498,293 .73	22,277,132,595. 16	100.73%

Sumber : Data Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dari lima periode yang diteliti sebagian besar mengalami selisih yang diharapkan, hanya pada tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami selisih yang tidak diharapkan yaitu masing-masing sebesar Rp. 73,080,145,654.63, 19,469,242,909.08 dan Rp. 98,252,314,348.96. Secara umum dapat dilihat dari analisis varians pendapatan daerah Kabupaten Berau dapat dikatakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase realisasi anggaran pendapatan sebesar 100.73%. Persentase tertinggi yaitu pada

tahun 2018 sebesar 108.84%,
sedangkan persentase terendah
terjadi pada tahun 2017 yaitu
sebesar 94.95%.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya. Pertumbuhan Pendapatan Daerah diharapkan mengalami pertumbuhan yang positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan negatif maka hal itu menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan.

Berikut ini merupakan tabel perhitungan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau pada tahun 2015-2019:

Tabel 5.2 Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tahun	Uraian	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan (1)	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya (2)	Pertumbuhan (1-2)	Persentase (%) (1-2) : 2
2015	Pendapatan Asli Daerah	234,352,937,890.72	-	-	-
	Dana Perimbangan	1,581,298,618,870.00	-	-	-
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	401,175,921,200.00	-	-	-
	Total Pertumbuhan	2,216,827,477,960.72	-	-	-
2016	Pendapatan Asli Daerah	207,964,300,327.92	234,352,937,890.72	-26,388,637,562.80	-11.26%
	Dana Perimbangan	1,407,092,658,718.00	1,581,298,618,870.00	-174,205,960,152.00	-11.02%
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	293,441,989,800.00	401,175,921,200.00	-107,733,931,400.00	-26.85%
	Total Pertumbuhan	1,908,498,948,845.92	2,216,827,477,960.72	-308,328,529,114.80	-13.91%
2017	Pendapatan Asli Daerah	222,327,142,550.04	207,964,300,327.92	14,362,842,222.12	6.91%
	Dana Perimbangan	1,267,424,645,998.00	1,407,092,658,718.00	-139,668,012,720.00	-9.93%
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	438,295,931,000.00	293,441,989,800.00	144,853,941,200.00	49.36%
	Total Pertumbuhan	1,928,047,719,548.04	1,908,498,948,845.92	19,548,770,702.12	1.02%
2018	Pendapatan Asli Daerah	210,492,657,329.57	222,327,142,550.04	-11,834,485,220.47	-5.32%
	Dana Perimbangan	1,682,458,853,256.00	1,267,424,645,998.00	415,034,207,258.00	32.75%
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	426,284,590,280.80	438,295,931,000.00	-12,011,340,719.20	-2.74%
	Total Pertumbuhan	2,319,236,100,866.37	1,928,047,719,548.04	391,188,381,318.33	20.29%
2019	Pendapatan Asli Daerah	220,394,345,385.12	210,492,657,329.57	9,901,688,055.55	4.70%
	Dana Perimbangan	2,017,537,589,443.00	1,682,458,853,256.00	335,078,736,187.00	19.92%
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	670,834,600,659.46	426,284,590,280.80	244,550,010,378.66	57.37%
	Total Pertumbuhan	2,908,766,535,487.58	2,319,236,100,866.37	589,530,434,621.21	25.42%
Rata-Rata					8.54%

Sumber : Data Diolah (2020)

Berdasarkan perhitungan tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2015 sampai 2019 dikatakan mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan yaitu 8,54%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 25.42%, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu negatif 13.91%.

Rasio Keuangan

a. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut ini

merupakan tabel perhitungan derajat desentralisasi:

Tabel 5.3 Derajat Desentralisasi

Tahun	Realisasi PAD 1	Realisasi Pendapatan Daerah 2	Derajat Desentralisasi (%) (1:2)	Keterangan
2015	234,352,937,890.72	2,216,827,477,960.72	10.57%	Kurang
2016	207,964,300,327.92	1,908,198,948,845.92	10.90%	Kurang
2017	222,327,142,550.04	1,847,343,428,299.04	12.03%	Kurang
2018	210,492,657,329.57	2,319,236,100,866.37	9.08%	Sangat Kurang
2019	220,394,345,385.12	2,908,766,535,487.58	7.58%	Sangat Kurang
Rata-Rata	219,106,276,696.67	2,240,074,498,291.93	10.03%	Kurang

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan perhitungan tabel 5.3 diatas terlihat bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Berau dapat dikatakan rendah. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2015-2019 yaitu 10.03%. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Berau untuk menggali dan mengelola pendapatan daerah masih rendah. Untuk itu kedepannya Kabupaten Berau harus lebih berupaya untuk dapat meningkatkan PAD nya baik dengan menggali potensi baru

ataupun mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang sudah ada.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Berikut ini merupakan tabel perhitungan efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau pada tahun 2015-2019:

Tabel 5.4 Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD (1)	Target PAD (2)	Efektivitas (%) (1:2)	Keterangan
2015	234.352.937.890.72	230.580.260.595.35	101.64%	Efektif
2016	207.964.300.327.92	198.340.920.000.00	104.85%	Efektif
2017	222.327.142.550.04	250.791.459.650.00	88.65%	Kurang Efektif
2018	210.492.657.329.57	201.967.373.976.63	104.22%	Efektif
2019	220.394.345.385.12	215.211.192.729.00	102.41%	Efektif
Rata-Rata	219.106.276.696.67	219.378.241.390.20	100.35%	Efektif

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan perhitungan tabel 5.4 diatas dapat diketahui bahwa efektivitas PAD pada

tahun 2017 kurang efektif, karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100% yaitu 88.65%. Untuk tahun 2015,2016, 2018 dan 2019 sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah melebihi dari 100% yaitu 101.64%, 104.85%, 104.22% dan 102.41%. Jika dilihat secara umum rata-rata rasio efektivitas PAD selama lima tahun periode tersebut dapat dikatakan efektif.

b. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.

Berikut ini merupakan tabel perhitungan efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau pada tahun 2015-2019:

Tabel 5.5 Rasio Efektivitas Pajak daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (1)	Target Pajak Daerah (2)	Efektivitas (%) (1:2)	Keterangan
2015	38,025,159,215.20	34,529,471,000.00	110.12%	Efektif
2016	39,032,473,276.15	36,922,909,000.00	105.71%	Efektif
2017	48,728,108,332.00	42,777,056,000.00	113.91%	Efektif
2018	63,879,234,164.00	55,331,129,000.00	115.45%	Efektif
2019	74,856,934,788.45	65,000,000,000.00	115.16%	Efektif
Rata-Rata	52,904,381,955.16	46,912,113,000.00	112.07%	Efektif

Sumber : Data Diolah (2020)

Berdasarkan dari tabel 5.4 di atas dapat diketahui bahwa efektivitas pajak daerah pada tahun 2015-2019 efektivitas penerimaan pajak daerah mengalami fluktuasi tetapi masih berada dibawah pokok ketetapan yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Semakin tinggi tingkat efektivitas pajak daerah, maka semakin efektif pemungutan pajak dalam pajak daerah, untuk tahun 2015 efektivitas pajak daerah sebesar 110.12%, untuk tahun 2016 efektivitas pajak daerah mengalami penurunan menjadi 105.71%, untuk tahun

2017 dan 2018 efektivitas pajak daerah mengalami peningkatan menjadi 113.91%, dan 115.45%. Untuk tahun 2019 efektivitas pajak daerah mengalami penurunan menjadi 115.16%. Jika dilihat secara umum, rata-rata rasio efektivitas pajak daerah selama lima periode tersebut dapat dikatakan efektif karena mencapai angka rata-rata sebesar 112.07%.

Pembahasan

Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians secara umum menunjukkan bahwa Kinerja BAPENDA Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau dapat dikatakan baik Ditunjukkan dengan sebagian besar tahun yang diteliti mengalami selisih lebih atau selisih yang diharapkan dan hanya tahun 2015,2016 dan 2017 yang mengalami selisih kurang. Dikuatkan juga dengan target realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2015-2019 memiliki angka rata-rata sebesar 100.73 %. Jika dilihat dari lima periode yang

diteliti, maka persentase paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 94.95%.

Analisis Pertumbuhan

Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah di Kabupaten Berau tahun 2016 sampai 2019 setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan pendapatan daerah yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 25.42%. Dan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuatif setiap tahunnya.

Rasio Keuangan

a. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan daerah guna membiayai pembangunan. Dari tabel 5.3 kontribusi yang diberikan PAD untuk pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami

peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, namun jika dilihat dari klasifikasi kriteria derajat desentralisasi kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD masih sangat kurang terhadap pendapatan daerah. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 12.03% dengan kriteria sangat kurang. Dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 7.58% dengan kriteria kurang.

Jika dilihat dari data tahun terakhir yaitu tahun 2019, Pemerintah daerah Kabupaten Berau belum mampu menjalankan pemerintahannya sendiri. Hal ini terbukti bahwa dalam hal pendanaan keuangannya saja pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, karena dana yang bersumber dari PAD masih sangat minim.

Jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau tidak terlalu besar untuk dapat

memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Jika dilihat dari rata-rata persentase derajat desentralisasi yaitu sebesar 10.03%. Artinya PAD belum terlalu besar memberikan iuran/sumbangan yang berarti bagi pendapatan daerah Kabupaten Berau.

b. Rasio Efektivitas PAD

Tingkat persentase terhadap kinerja BAPENDA dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah lima tahun penelitian dapat diukur dengan rasio efektivitas PAD untuk tahun 2015 pencapaian PAD sebesar 101,64%, untuk tahun 2016 pencapaian mengalami peningkatan menjadi 104,85%, untuk tahun 2017 pencapaian PAD mengalami penurunan menjadi 88.65%. Untuk tahun 2018 pencapaian mengalami peningkatan menjadi 104.22% dan untuk 2019 pencapaian mengalami penurunan menjadi 102.41%

Jika dilihat dari Pengukuran PAD kemampuan BAPENDA Kabupaten Berau dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila pencapaian efektifitas yang dicapai minimal sebesar 100%, semakin tinggi tingkat efektifitas yang diperoleh maka menunjukkan kemampuan BAPENDA dalam pencapaian targetnya semakin baik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dilakukan penulis dapat dilihat bahwa perolehan efektifitas rata – rata penerimaan target PAD yang dicapai yaitu sebesar 100.35%. Hal ini menunjukkan bahwa BAPENDA Kabupaten Berau dalam mengelola PAD telah efektif.

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tingkat persentase kinerja BAPENDA dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah lima tahun penelitian

dapat diukur dengan rasio efektivitas pajak daerah untuk tahun 2015 pencapaian pajak daerah sebesar 110,12%, untuk tahun 2016 pencapaian mengalami penurunan menjadi 105,71%, untuk tahun 2017, dan 2018 pencapaian pajak daerah mengalami peningkatan menjadi 113.91% dan 115.45%. Untuk tahun 2019 pencapaian mengalami penurunan menjadi 115.16%.

Jika dilihat dari Pengukuran pajak daerah kemampuan BAPENDA Kabupaten Berau dalam menjalankan tugasnya dikategorikan sangat efektif apabila pencapaian efektifitas yang dicapai minimal sebesar 100%, semakin tinggi tingkat efektifitas yang diperoleh maka menunjukkan kemampuan BAPENDA dalam pencapaian targetnya semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dilakukan penulis dapat dilihat bahwa perolehan efektifitas rata – rata penerimaan target pajak daerah

yang dicapai yaitu sebesar 112.07%. Hal ini menunjukkan bahwa BAPENDA Kabupaten Berau dalam mengumpulkan pajak daerah telah efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data realisasi anggaran PAD Kabupaten Berau diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja BAPENDA Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dalam lima tahun terakhir dapat diukur dengan menggunakan analisis varians (selisih) anggaran pendapatan. Jika dilihat rata-rata analisis varians (selisih) anggaran pendapatan sebesar 100.73%. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019:136) yaitu pemerintah daerah kabupaten berau dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.
2. Kinerja BAPENDA Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dalam lima tahun

penelitian dapat diukur dengan menggunakan analisis pertumbuhan pendapatan daerah. Jika dilihat Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan yaitu 8.54%.

3. Kinerja BAPENDA Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dalam lima tahun penelitian dapat diukur dengan menggunakan derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan. Jika dilihat dari klasifikasi kriteria derajat desentralisasi kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD masih sangat kurang terhadap pendapatan daerah. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2015-2019 yaitu 10.03% dengan kriteria sangat kurang.
4. Kinerja BAPENDA Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dalam lima tahun terakhir dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas PAD. Jika dilihat rata-rata rasio efektivitas

PAD sebesar 100.35%. Hal ini menunjukkan bahwa BAPENDA Kabupaten Berau dalam mengelola PAD telah efektif.

5. Kinerja BAPENDA Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dalam lima tahun terakhir dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas pajak daerah. Jika dilihat rata-rata rasio efektivitas pajak daerah sebesar 112.07%. Hal ini menunjukkan bahwa BAPENDA Kabupaten Berau dalam mengumpulkan pajak daerah telah efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau harus mengoptimalkan lagi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah tersedia di Kabupaten Berau guna mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau harus mengevaluasi kinerja keuangan

setiap tahunnya, agar dapat mengetahui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah apa saja yang perlu ditingkatkan. Agar kedepannya Kabupaten Berau bisa tumbuh menjadi Kabupaten yang mandiri, mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi. (2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi No. 3*, 246-266.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Kusumastuti, V. P. (2010). *Analisis Kontribusi, Efisiensi, Dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah*. Skripsi: Universitas Sanata Darma Yogyakarta.
- Laksmi, D. N. (2016). Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Realisasi PAD Tahun Anggaran 2006-2015. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Keempat*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
- Pramita, P. R. (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Skripsi: Universitas negeri Yogyakarta.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisis Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Cv Budi Utama.

SUMBER LAIN :

- Fakultas Ekonomi. (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb. Berau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013
tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah



